

ANALISIS CAPAIAN ROMBONGAN BELAJAR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 DALAM UPAYA IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 17 TAHUN 2017

Novrian Satria Perdana *

Abstract

This study is to analyze the achievement of study groups in Lampung in 2018 in the effort of implementation of Permendikbud Number 17 year 2017 to achieve the effectiveness of learning. The results of this study are: 1) For the elementary level of student ratio every *rombel* is the largest city, for junior high school ratients every *rombel* is the largest city, for high school student ratio every *rombel* is the largest city, and for the highest student ratio per student *rombel* level is West Coast District; 2) Only elementary school has *rombel* student ratio exceed Permendikbud Number 17 Year 2017; and 3) There are still some students who have National Examination value below National and Provincial Average, and high standard deviation result of National Examination result. This indicates that students' understanding of learning is still uneven across regions and is caused by the high number of students every *rombel*.

Keywords: Study Learning Group, Lampung, Permendikbud

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar untuk mencapai kualitas hidup, baik untuk individu, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih bermartabat. Pendidikan penting dimiliki oleh semua manusia untuk kelangsungan hidup. Bangsa yang maju, meletakkan bidang pendidikan sebagai program yang strategis dalam pembangunan. Mereka sadar bahwa melalui pendidikan dapat meningkatkan

* Penulis merupakan Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia dan bekerja di Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan e-mail: novrian1711@gmail.com

kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, suatu bangsa dapat bersaing secara regional maupun internasional. Pada kenyataannya, pendidikan telah mampu membawa manusia ke arah kehidupan yang lebih beradab. Pendidikan juga merupakan investasi yang paling utama bagi bangsa, apalagi bagi bangsa yang sedang berkembang. Pembangunan dalam sebuah negara hanya dapat dilakukan oleh manusia yang dipersiapkan melalui pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan harus dipersiapkan untuk menunjang pembangunan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Keberhasilan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan akan sangat bergantung kepada manajemen komponen-komponen pendukung pelaksanaan kegiatan seperti kurikulum, peserta didik, pembiayaan tenaga pelaksana, dan sarana prasarana. Nasihin & Sururi (2014) menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan lembaga pendidikan akan sangat tergantung pada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik ini memberikan kontribusi yang tinggi dan memberikan dukungan yang kuat terhadap komponen-komponen yang lain di lembaga pendidikan dalam pencapaian tujuan sekolah. Komponen peserta didik keberadaannya sangat dibutuhkan, terlebih bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah peserta didik merupakan subyek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan. Oleh karena itu keberadaan peserta didik tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan saja tetapi harus merupakan bagian kebermutuan lembaga pendidikan, artinya manajemen peserta didik dibutuhkan bagi lembaga pendidikan sebagai tempat peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik.

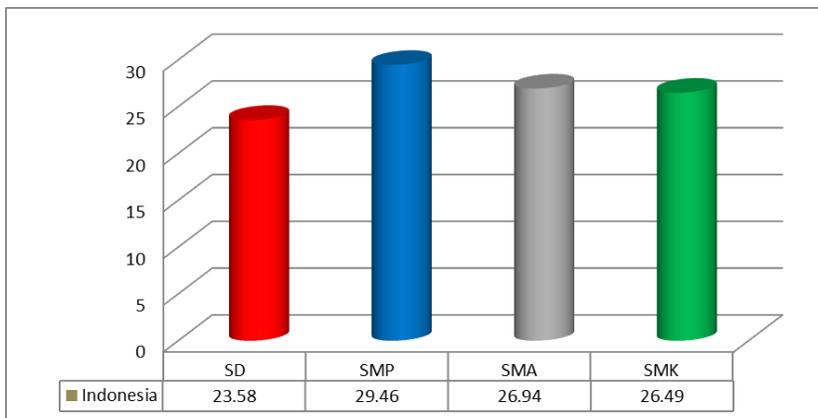
Manajemen peserta didik dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif demi tercapainya mutu pendidikan. Menurut Basyar (2016), mutu dimaknakan sebagai standar dan keunggulan, sehingga unsur utama kualitas dalam manajemen mutu dipahami sebagai proses adanya kepastian bahwa telah terdapat standar yang spesifik dan secara terus menerus diupayakan dicapai untuk sebuah produk atau layanan yang unggul. Dengan demikian jika mutu diterapkan dalam pembelajaran menunjuk pada tinggi rendahnya pembelajaran dibandingkan dengan standar. Selanjutnya

berkaitan dengan pembelajaran yang efektif dapat bermula dari iklim kelas yang dapat menciptakan suasana belajar yang menggairahkan, untuk itu perlu diperhatikan pengaturan/penataan ruang kelas dan isinya. Lingkungan kelas perlu ditata dengan baik sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang aktif antara siswa dengan guru, dan antar siswa. Pengelolaan ruang dalam dunia pendidikan sangat penting bagi proses pembelajaran didalam sekolah. Tujuan utama penataan ruang kelas ialah mengarahkan kegiatan siswa dan mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan melalui penataan tempat duduk, perabot, pajangan, dan barang-barang lainnya.

Dalam kaitan penataan ruang kelas perlu diperhatikan jumlah rombongan belajar. Menurut Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 definisi Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Menurut Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Pasal 24, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut: a). **SD** dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; b). **SMP** dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik; c). **SMA** dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik; d). **SMK** dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik; e). **Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)** dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan f). **Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)** dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.

Berkaitan dengan jumlah rombongan belajar (rombel), berdasarkan data Dapodikbud (2018) kondisi saat ini dari sejumlah 45.411.768 siswa pada seluruh jenjang pendidikan terbagi menjadi sejumlah rasio siswa rombel adalah sebesar 23,58 untuk jenjang SD, sebesar 29,46 untuk jenjang SMP, sebesar 26,94 untuk jenjang SMA, dan sebesar 26,49 untuk jenjang SMK (lihat gambar 1). Jika dibandingkan dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, maka kondisi rasio tersebut masih jauh dari batas maksimal yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Artinya, proses pembelajaran

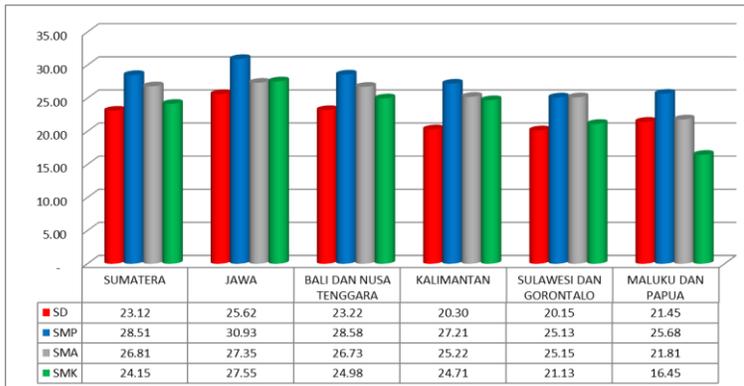
masih dapat dikatakan efektif karena jumlah siswa yang ada dalam setiap rombel tidak melebihi batas efektif yang tertuang dalam permendikbud tersebut. Menurut Nana Sudjana (1990) efektivitas dapat diartikan sebagai tindakan keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa hasil belajar secara maksimal. Keefektifan proses pembelajaran berkenaan dengan jalan, upaya teknik dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara optimal, tepat dan cepat. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu pembelajaran, antara lain berasal dari faktor guru, faktor siswa, materi pembelajaran, media, metode maupun model pembelajaran. Faktor siswa yang dimaksud dapat diartikan sebagai jumlah siswa, semakin banyak jumlah siswa akan berdampak pada konsentrasi guru dan siswa lainnya dalam kegiatan belajar mengajar yang berkualitas.



Sumber: *Dapodikbud*, 2018

Gambar 1. Rasio Siswa Rombel Semua Jenjang Pendidikan di Indonesia

Selain capaian rasio siswa rombel di Indonesia, berikut ini disampaikan capaian siswa rombel di masing-masing Pulau di Indonesia tahun 2018:



Sumber: Dapodikbud, 2018

Gambar 2. Rasio Siswa Rombel Semua Jenjang Pendidikan Antar Pulau di Indonesia

Rasio Siswa Rombel pada gambar 2 dibagi menjadi 6 Pulau yaitu, Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Gorontalo, dan Maluku dan Papua. Diantara keenam pulau tersebut, untuk rata-rata capaian siswa rombel **jenjang SD** hanya Pulau Jawa (25,62) yang memiliki jumlah rasio siswa rombelnya melebihi rata-rata rasio siswa SD Nasional (23,58). Selanjutnya mengenai rata-rata capaian rasio pada **jenjang SMP**, diantara keenam Pulau tersebut hanya Pulau Jawa (30,93) yang memiliki rata-rata rasio siswa rombel di atas Nasional (29,46). Selanjutnya mengenai rata-rata capaian rasio pada **jenjang SMA**, diantara keenam Pulau tersebut hanya Pulau Jawa (27,35) yang memiliki rata-rata rasio siswa rombel di atas Nasional (26,94). Terakhir, mengenai rata-rata capaian rasio pada **jenjang SMK**, diantara keenam Pulau tersebut hanya Pulau Jawa (27,55) yang memiliki rata-rata rasio siswa rombel di atas Nasional (26,49). Berdasarkan capaian rasio siswa rombel di enam Pulau, rasio siswa rombel di pulau tersebut yang terbanyak didominasi oleh Pulau Jawa. Namun diantaranya tidak ada jumlah rasio siswa rombel yang melebihi batas ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

Pengaturan jumlah siswa dalam rombel dimaksudkan untuk mencapai kualitas/mutu proses pendidikan. Pengertian mutu dalam konteks pendidikan mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu melibatkan berbagai *input* seperti bahan ajar, metode pembelajaran, sarana

sekolah, dukungan administrasi, dan sarana prasarana serta sumber daya lainnya untuk penciptaan suasana sekolah yang kondusif. Mutu dalam pendidikan untuk menjamin kualitas input, proses, produk/*output*, dan *outcome* sekolah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas sekolah. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap diproses. Proses pendidikan yang bermutu apabila mampu menerapkan PAKEM yang efektif. *Output* dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non akademik peserta didik tinggi. *Outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar atau sesuai, dan semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan.

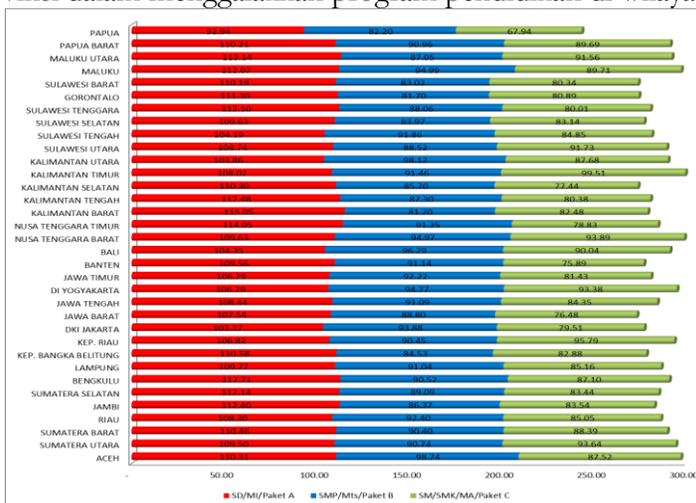
Ada beberapa faktor untuk menilai tingkat kualitas/mutu pendidikan yang dapat dilihat dari indikator-indikator kualitas proses pendidikan. Untuk merumuskan indikator kualitas pendidikan Morrison, Mokashi & Cotter (2006) telah mengadakan meta-analisis terhadap beberapa penelitian dari tahun 1960 sampai tahun 2009 yang menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Berdasarkan meta-analisis tersebut disimpulkan adanya 44 indikator kualitas pendidikan yang dikelompokkan kedalam 10 kategori. Secara umum ke 10 kategori indikator kualitas pendidikan tersebut adalah sebagai berikut: 1) pembiayaan penyelenggaraan pendidikan; 2) iklim kelas kondusif untuk kegiatan pendidikan; 3) kompetensi guru sebagai pelaksana kegiatan pendidikan di tingkat kelas; 4) guru melaksanakan kegiatan pendidikan secara sistematis dan terfokus; 5) guru menyajikan materi dengan bijaksana; 6) pendidikan bersifat riil (otentik dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan siswa); 7) ada penilaian diagnostik yang dilakukan secara periodik; 8) membaca dan menulis sebagai kegiatan yang esensial dalam pendidikan; 9) menggunakan pertimbangan yang rasional dalam memecahkan masalah; 10) menggunakan teknologi pendidikan, baik untuk mengajar maupun kegiatan belajar siswa.

Pentingnya pengaturan jumlah siswa dalam rombongan dapat berdampak terhadap hasil belajar sejalan dengan teori Pendekatan Modifikasi Tingkah Laku yang dikemukakan oleh B.F.Skinner. Teori pembelajaran ini menerapkan prinsip penguatan (*reinforcement*) untuk mengidentifikasi aspek situasi pendidikan yang penting dan mengatur kondisi sedemikian rupa yang memungkinkan peserta

didik dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Pengenalan karakteristik peserta didik dan karakteristik situasi belajar perlu dilakukan untuk mengetahui setiap kemajuan belajar yang diperoleh peserta didik. Intinya adalah kecukupan jumlah siswa dalam satu rombel akan membuat situasi belajar menjadi lebih kondusif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sejalan dengan teori tersebut, penelitian mengenai jumlah siswa per rombel pernah dilakukan di Amerika Serikat. Suatu eksperimen dibuat dengan membandingkan kelas kecil dan kelas reguler, di mana rerata jumlah siswa adalah 15 siswa dan 22 siswa per romboongan kelas dengan pengajar masing-masing berjumlah satu orang guru. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa pengurangan jumlah siswa per rombel dapat meningkatkan prestasi siswa setara dengan menambahkan 3 bulan sekolah di masa 4 tahun ke depan (STAR, 2002 dalam Whitehurst dan Chingos, 2011). Hasil penelitian ini menjadi dasar bagi AS untuk mengurangi jumlah siswanya per rombel dan menerbitkan kebijakan pengurangan jumlah siswa per kelas (*class size reduction/CSR*). Penelitian lain yang dilakukan oleh Mathew dalam Basyar (2016) juga melihat adanya faktor positif dalam ukuran rombongan belajar yang kecil. Ia menyatakan bahwa jumlah rombongan belajar yang lebih sedikit akan membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman dalam belajar. Namun, ia mengingatkan bahwa jumlah siswa juga tidak boleh terlalu sedikit karena proses sosialisasi dan kolaborasi adalah juga bagian dari pembelajaran. Menurutnya, pengurangan jumlah siswa tidak boleh lebih sedikit dari 7 – 10 orang di tingkat sekolah dasar. Pengurangan jumlah siswa per rombel antara 7-10 siswa dapat memberikan efek positif terhadap prestasi siswa. Efek terhadap prestasi akan lebih besar terlihat jika pengurangan jumlah siswa dilakukan di kelas rendah dan untuk siswa dari kalangan keluarga tak mampu (Whitehurst dan Chingos, 2011). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wiley dalam Apridasari (2016) juga menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara *quality of schooling* dan *study achievement*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai sekolah yang berkualitas maka proses pembelajaran harus efektif, dan salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan pengaturan jumlah siswa dalam rombongan belajar. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Subekti (2014) yang menyimpulkan bahwa optimalisasi

penempatan jumlah siswa dalam rombongan belajar berpengaruh terhadap efektifitas proses interaktif guru dan siswa.

Teori dan beberapa penelitian di atas menyimpulkan bahwa pengaturan jumlah siswa dalam rombongan belajar sangat penting dalam upaya pencapaian kualitas proses pendidikan, dan hal ini juga berlaku di Provinsi Lampung. Berdasarkan data dapodikbud (2018) Provinsi Lampung telah memiliki 7.000 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan untuk menampung siswa sebanyak 1.450.319 siswa. Berkaitan dengan partisipasi bersekolah yang digambarkan pada capaian APK tahun 2017 di Provinsi Lampung telah mencapai nilai APK sebesar 109,77 untuk jenjang SD/MI/ sederajat, sebesar 91,04 jenjang SMP/MTs/ sederajat, dan sebesar 85,16 untuk jenjang SM/ sederajat. Jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional pada tahun yang sama, capaian APK di Provinsi Lampung telah melampaui rata-rata Nasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan sekolah di Provinsi Lampung telah terpenuhi dan keberhasilan program Pemerintah Provinsi dalam menggalakkan program pendidikan di wilayahnya.

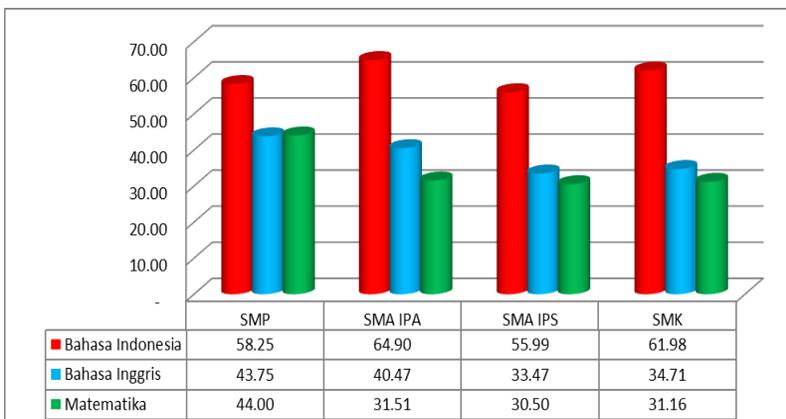


Sumber: BPS, 2018

Gambar 3. Angka Partisipasi Kasar Per Provinsi Tahun 2017

Berdasarkan gambar 3 di atas capaian partisipasi bersekolah di Provinsi Lampung dikatakan cukup baik dengan beberapa Provinsi lainnya, dan bahkan untuk wilayah Sumatera capaian APK Provinsi Lampung menempati peringkat lima besar. Namun sayangnya capaian partisipasi bersekolah tidak diimbangi capaian kualitas

lulusan yang pada kali ini diukur dari hasil rata-rata Ujian Nasional (UN). Pada gambar 4 di bawah ini disampaikan hasil rata-rata UN Provinsi Lampung tahun 2017 khusus untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika pada jenjang SMP, SMA IPA, SMA IPS dan SMK. Untuk capaian nilai UN terbaik untuk mata pelajaran bahasa Indonesia diraih oleh SMA IPA, untuk mata pelajaran Bahasa Inggris diraih oleh jenjang SMP dan pelajaran Matematika diraih oleh SMP. Masih rendahnya hasil rata-rata UN Provinsi Lampung ini salahsatunya disebabkan oleh efektifitas belajar yang belum maksimal. Beberapa faktor dapat mempengaruhi efektifitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya adalah jumlah siswa dalam satu rombongan belajar.



Sumber: Dapodikbud, 2018

Gambar 4. Rata-rata Hasil Ujian Nasional Provinsi Lampung Tahun 2017

Mengingat pentingnya peranan jumlah siswa dalam rombongan belajar berdasarkan teori dari B.F. Skinner dan hasil penelitian terdahulu, oleh karena itu permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana capaian rombongan belajar di provinsi lampung tahun 2018 dalam upaya implementasi Permendikbud nomor 17 tahun 2017?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis capaian rombongan belajar di Provinsi Lampung tahun 2018 dalam upaya implementasi Permendikbud nomor 17 tahun 2017 untuk mencapai efektifitas pembelajaran.

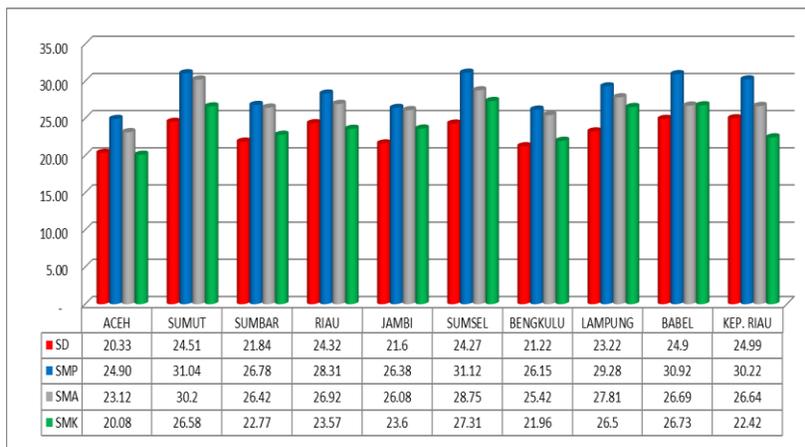
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data sekunder. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode *discovery*, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2011).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif yang bersumber dari data pokok pendidikan dan kebudayaan tahun 2018 terkait capaian rasio siswa per rombongan belajar di wilayah Provinsi Lampung tahun 2018. Data kuantitatif diolah dan dianalisis untuk mengetahui capaian wilayah yang dibandingkan dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dan sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Pembahasan

Pulau Sumatera terdiri dari 10 Provinsi, antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Diantara kesepuluh provinsi tersebut, untuk rata-rata capaian siswa rombel **jenjang SD** yang rasionya melebihi rata-rata rasio siswa SD Nasional (23,58) adalah Provinsi Sumatera Utara (24,51), Riau (24,32), Sumatera Selatan (24,27), Bangka Belitung (24,90), dan Kepulauan Riau (24,99). Diantara kelima Provinsi tersebut yang terbesar rasionya adalah Provinsi Kepulauan Riau, dan hal ini

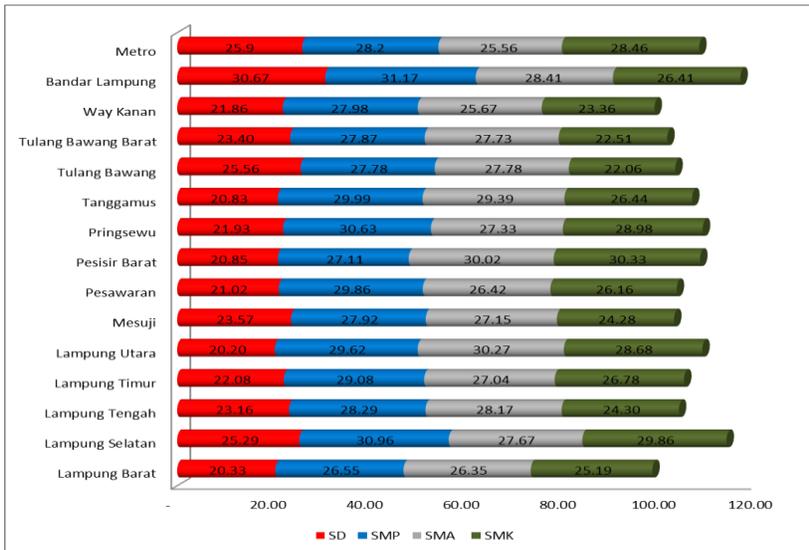
terjadi karena wilayahnya yang berupa kepulauan dan ketidakseimbangan antar wilayah ketersediaan jumlah sekolah jenjang SD (sebanyak 932 SD) dengan jumlah siswa yang ada pada jenjang tersebut (sebanyak 223.236 siswa). Selanjutnya mengenai capaian rasio pada **jenjang SMP** di Pulau Sumatera, diantara kesepuluh Provinsi tersebut yang memiliki rata-rata rasio siswa SMP di atas rasio siswa rombel Nasional (29,46) adalah Provinsi Sumatera Utara (31,04), Sumatera Selatan (31,12), Bangka Belitung (30,92) dan Kepulauan Riau (30,22). Diantara keempat Provinsi tersebut, yang terbesar adalah Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi saat ini di Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki 1.328 SMP Negeri dan Swasta untuk menampung siswa sebanyak 354.200 siswa. Selanjutnya mengenai capaian rasio pada **jenjang SMA** di Pulau Sumatera, diantara kesepuluh Provinsi tersebut yang memiliki rata-rata rasio siswa SMA di atas rasio siswa rombel Nasional (26,94) adalah Provinsi Sumatera Utara (30,2), Sumatera Selatan (28,75), dan Lampung (27,81). Diantara ketiga Provinsi tersebut yang terbesar adalah Provinsi Sumatera Utara. Kondisi saat ini di Provinsi Sumatera Utara telah memiliki 1.066 SMA Negeri dan Swasta untuk menampung siswa sebanyak 365.495 siswa. Terakhir, mengenai capaian rasio pada **jenjang SMK** di Pulau Sumatera, diantara kesepuluh Provinsi tersebut yang memiliki rata-rata rasio siswa SMK di atas rasio siswa rombel Nasional (26,49) adalah Provinsi Sumatera Utara (26,58), Sumatera Selatan (27,31), Lampung (26,50), dan Bangka Belitung (26,73). Diantara keempat Provinsi tersebut yang terbesar adalah Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi saat ini di Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki 300 SMK Negeri dan Swasta untuk menampung siswa sebanyak 110.575 siswa.



Sumber: Dapodikbud, 2018

**Gambar 5. Rasio Siswa Rombel
Semua Jenjang Pendidikan di Pulau Sumatera**

Berdasarkan gambar 5 di atas, provinsi Lampung memiliki capaian rasio siswa rombel pada level sesuai dengan Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Untuk jenjang SD yang mensyaratkan jumlah minimal 20 siswa dan maksimal 28 siswa dalam satu rombel, capaian provinsi Lampung mencapai 23,22 siswa per rombel. Kemudian untuk jenjang SMP yang mensyaratkan jumlah minimal 20 siswa dan maksimal 32 siswa dalam satu rombel, capaian provinsi Lampung mencapai 29,28 siswa per rombel. Untuk jenjang SMA yang mensyaratkan jumlah minimal 20 siswa dan maksimal 36 siswa dalam satu rombel, capaian provinsi Lampung mencapai 26,69 siswa per rombel. Dan yang terakhir untuk jenjang SMK yang mensyaratkan jumlah minimal 15 siswa dan maksimal 36 siswa dalam satu rombel, capaian provinsi Lampung mencapai 26,5 siswa per rombel. Berdasarkan hasil tersebut mengindikasikan bahwa proses pembelajaran di provinsi Lampung dapat dikatakan efektif karena jumlah siswa per rombelnya tidak melebihi batas yang ditentukan dalam Permendikbud Nomor 17 tahun 2017.



Gambar 6. Rasio Siswa Rombel Semua Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung

Selanjutnya berdasarkan gambar 6, di Provinsi Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/Kota, antara lain diantara kelima belas wilayah tersebut, untuk rata-rata capaian siswa rombel **jenjang SD** yang rasionya melebihi rata-rata rasio siswa SD Provinsi (23,22) adalah Lampung Selatan (25,29), Mesuji (23,57), Tulang Bawang (25,56), Tulang Bawang Barat (23,40), Bandar Lampung (30,67) dan Metro (25,9). Diantara keenam wilayah tersebut yang terbesar rasionya adalah Bandar Lampung. Rasio di kota Bandar Lampung selain melebihi rasio Provinsi juga melebihi rasio nasional sehingga hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemda untuk menambah jumlah SD agar pembelajaran di sekolah lebih efektif. Selanjutnya mengenai capaian rasio pada **jenjang SMP**, diantara kelima belas wilayah tersebut yang memiliki rata-rata rasio siswa SMP di atas rasio siswa rombel Provinsi (29,28) adalah Lampung Selatan (30,96), Lampung Utara (29,62), Pesawaran (29,86), Pringsewu (30,63), Tanggamus (29,99), dan Bandar Lampung (31,17). Diantara keenam wilayah tersebut, yang terbesar adalah Bandar Lampung.

Selanjutnya mengenai capaian rasio pada **jenjang SMA**, diantara kelima belas wilayah tersebut yang memiliki rata-rata rasio siswa SMA di atas rasio siswa rombel Provinsi (27,81) adalah Lampung Tengah (28,17), Lampung Utara (30,27), Pesisir Barat (30,02), Tanggamus (29,39), dan Bandar Lampung (28,41). Diantara keenam wilayah tersebut yang terbesar adalah Bandar Lampung. Kondisi saat ini di Kota Bandar Lampung memiliki 17 SMA Negeri dan 48 SMA Swasta untuk menampung siswa sebanyak 26.280 siswa. Terakhir, mengenai capaian rasio pada **jenjang SMK**, diantara kelima belas wilayah tersebut yang memiliki rata-rata rasio siswa SMK di atas rasio siswa rombel Provinsi (26,5) adalah Lampung Selatan (29,86), Lampung Timur (26,78), Lampung Utara (28,68), Pesisir Barat (30,33), Pringsewu (28,98), dan Metro (28,46). Diantara keenam wilayah tersebut yang terbesar adalah Pesisir Barat. Kondisi saat ini di Pesisir Barat memiliki 3 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta untuk menampung siswa sebanyak 1.987 siswa. Di Kabupaten Pesisir Barat kondisi siswa tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya pada tahun 2018 cukup banyak. Untuk jenjang SMP ke SM, terdapat 764 siswa yang tidak melanjutkan. Namun kondisi jumlah siswa tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah siswa SD yang tidak lanjut ke jenjang SMP yang mencapai angka 11.670 siswa. Adanya peningkatan jumlah siswa melanjutkan ke jenjang berikutnya ini menjadi prestasi tersendiri bagi Pemerintah Provinsi yang saat ini dipercaya untuk mengelola jenjang pendidikan menengah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Masih berdasarkan gambar 6 di atas, diantara kelima belas wilayah di Provinsi Lampung yang rasio siswa per rombelnya mengalami peningkatan dari jenjang SD hingga SM adalah Kabupaten Pesisir Barat. Ini dapat diartikan bahwa minat anak-anak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan sangat tinggi namun tidak diimbangi dengan jumlah sekolah yang tersedia. Agar efektif dan berdampak optimal terhadap proses pembelajaran, kebijakan pengurangan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar juga harus diiringi dengan kebijakan pendukung lainnya. Jika tidak, kebijakan ini hanya akan berdampak pada kompleksitas masalah.

Pengurangan jumlah peserta didik dalam satu rombel dapat berakibat kepada penambahan jumlah ruang kelas, meningkatnya jumlah kebutuhan jam mengajar bagi guru, dan berkurangnya daya tampung siswa. Penambahan ruangan kelas untuk menampung siswa yang berlebih akan menimbulkan masalah jika sekolah tidak memiliki cukup ruang kelas. Hal ini akan memaksa sekolah menerapkan sistem *double shift* (kelas pagi dan sore). Dalam konteks kebijakan, sistem *double shift* berpotensi menghambat penerapan program sekolah lima hari yang dicanangkan Mendikbud.

Simpulan

Berdasarkan analisis data sekunder, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk jenjang SD rasio siswa per rombel yang terbesar adalah Kota Bandar Lampung, untuk jenjang SMP rasio siswa per rombel yang terbesar adalah Kota Bandar Lampung, untuk jenjang SMA rasio siswa per rombel yang terbesar adalah Kota Bandar Lampung, dan untuk jenjang SMK rasio siswa per rombel yang terbesar adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Hanya jenjang SD di kota Bandar Lampung yang memiliki rasio siswa rombelnya melebihi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017;
3. Masih ada beberapa siswa di kota Bandar Lampung yang memiliki nilai Ujian Nasional di bawah rata-rata Nasional dan Provinsi, serta capaian standar deviasi hasil Ujian Nasional yang cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman siswa terhadap pembelajaran masih belum merata antar wilayah dan salahsatunya disebabkan oleh jumlah siswa per rombel yang tinggi, ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh B.F.Skinner dan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini yangmana menyimpulkan bahwa pengaturan jumlah siswa dalam rombongan belajar sangat penting dalam upaya pencapaian kualitas proses pendidikan.

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran agar pemerintah bersedia membuka kelas baru atau sekolah baru di sejumlah wilayah yang memiliki rasio siswa

rombelnya melebihi ketentuan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

Daftar Pustaka

- Apridasari, Esty. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Mata Kuliah Bidang Akuntansi. Jurnal Dewantara Vol. Ii, Juli- Desember 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2017/2018 Menurut Provinsi. Diakses melalui website www.bps.go.id pada tanggal 20 Maret 2018.
- Basyar, Syaripudin. Manajemen Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Mahasiswa. Jurnal Dewantara Vol.I, No. 0 1 Januari- Juni 2016
- B.F. Skinner. 1953. Science and Human Behavior (New York: Free Press, 1953).
- Chingos, Matthew dan Whitehurst, Grover J. “Russ”, *“Class Size: What Research Says and What it Means for State Policy”*. Brown Center on Education Policy at Brookings, Mei 2011.
- Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan (Dapodikbud). 2018. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Monks, J. & Schmidt, R. 2010. The impact of class size and number of students on outcomes in higher education, Cornell University, School of Industrial and Labor, Working Papers-ILR Collection, September 2010.
- Morrison, D.M. & Mokashi, K. & Cotter, K. 2006. Intructional quality indicators: Research foundations. Cambrigde.
- Nasihin dan Sururi, 2014. Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat
- Subekti, Solving dkk. 2014. Konsep Optimalisasi Distribusi Sekolah Tingkat Dasar (SD/MI) Berdasarkan Pola Persebaran Permukiman di Kabupaten Ngawi. Jurnal Teknik Pomits Vol. 3, No.2, (2014)
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.